ABSTRAK

.

Salah satu tujuan utama kebijakan luar negeri Spanyol adalah kembalinya Gibraltar ke dalam wilayah Spanyol, Pada masa Franco, Spanyol menutup jalur udara dan jalur di perbatasan untuk akses menuju ke Gibraltar pada tahun 1969 karena Inggris mengadakan referendum untuk memberikan self-determination kepada Gibraltar. Spanyol selalu menolak berbagai usulan terkait negosiasi tentang permasalahan Gibraltar dengan melibatkan Gibraltar. Di masa Pemerintahan Gonzalez, Spanyol menolak usulan Inggris dalam penggunaan bersama bandara yang ada di perbatasan dan tetap memprioritaskan Gibraltar kembali ke Spanyol. Di pemerintahan Aznar, Spanyol sempat menyetujui dengan Inggris untuk sharing sovereignty Gibraltar namun ditolak dengan Referendum Gibraltar. Saat Zapatero memimpin Spanyol, Spanyol melihatkan perbedaan sikap dari sebelumnya. Spanyol memulai dialog dengan melibatkan Gibraltar sebagai pihak independen. Kemudian Spanyol juga membuka jalur udaranya menuju ke Gibraltar dan menyetujui penggunaan bandara yang ada di perbatasan untuk penerbangan sipil pertama kalinya. Penelitian ini membahas penyebab perbedaan kebijakan <mark>luar neg</mark>eri Spanyo<mark>l te</mark>rhadap Gibraltar pada masa PM Zapatero dari pemerintahan sebelumnya. Penulis mendefinisikan kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan PM Zapatero berorientasi participatory. Dalam penelitian ini digunakan teori kebijakan luar negeri berdasarkan karakter personal pemimpin dari Margaret Hermann (1980), kemudian didukung dengan prekondisi keterkaitan antara pemimpin dan kebijakan luar negerinya yang dilihat melalui ketertarikan (interest) dan pengalaman (training). Melalui data yang dihimpun disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Spanyol yang diambil pada masa pemerintahan Zapatero terhadap Gibraltar dipengaruhi oleh karakter personal Zapatero sebagai Perdana Menteri. Kemudian ditemukan juga bahwa PM Zapatero memiliki karakter personal yang konsiliatif yang menyebabkan kebijakan luar negeri bersifat participatory.

Kata-kata Kunci: Karakter Personal, Kebijakan Luar Negeri, Spanyol, Gibraltar, Zapatero, konsiliatif, *participatory*.